

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : HERLINA TRICIA

Tempat/Tanggal Lahir : PADANG / 30 Agustus 1983

Nomor KTP/NIK : 1371107008830004

Alamat : komplek Perumadk III No. 40 Rt 003/005 Kurao Pagang, Kelurahan KURAO PAGANG, Kecamatan NANGGALO, KOTA PADANG, Provinsi SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

K H U S U S

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan dipertanyakan sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : MUHAMMAD RAIHAN ADRA

Tempat/Tanggal Lahir : PAYAKUMBUH / 18 November 2002

Nomor KTP/NIK : 1376011811020005

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 122 Kel. Pari Rantang Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

***) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



MAD RAIHAN ADRA

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : ADEK PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : PADANG / 8 Agustus 1979
Nomor KTP/NIK : 1376010808790004
Alamat : kompleks Perumadk III No. 40 Rt 003/005 Kurao Pagang, KURAO PAGANG, NANGGALO, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

← Tanda Terima (Verifikasi)



Aplikasi e-LHKPN

ke [Saya](#)



📧 3 hari yang lalu 14:23

Yth. Sdr. ADEK PUTRA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan kepada Saudara, bahwa Laporan e-LHKPN yang Saudara kirim telah terverifikasi administratif dan dinyatakan **Lengkap** dan siap untuk diumumkan, terlampir bukti Tanda Terima e-LHKPN Saudara sebagai bukti bahwa telah menyampaikan LHKPN ke KPK :

Atas Nama : ADEK PUTRA
Jabatan : KEPALA BIDANG
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun Pelaporan : 2020

Apabila Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan menaunduh di halaman



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ADEK PUTRA
NIK : 1376010808790004
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Unit Kerja : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUDK, KELUARGA
BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Sub Unit Kerja : BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2020
Tanggal Kirim : 19 Januari 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.